

LAMPIRAN

Produk Hukum Lokal yang Berkaitan dengan Perempuan

1. Kota Sukabumi – Jawa Barat:

Perda No. 16 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

Perda No. 19 Tahun 2000 tentang APBD tahun 2000

Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pelarangan Pelacuran

Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran

Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 133 Tahun 2001 tentang Susunan Personalia Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001

Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Dana Pembangunan Kelurahan Kota Sukabumi tahun Anggaran 2001

Surat Keputusan Walikota No. 163 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Tempat Maupun Kegiatan yang dapat Menimbulkan Perbuatan Maksiat

Surat Keputusan Walikota No. 120 Tahun 2002 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Bagian Proyek, Pemegang Kas PUMC Proyek Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan dan Kelurahan.

Surat Keputusan Walikota No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Peresmian Proyek Pembangunan Pendidikan.

2. Kota Tasikmalaya – Jawa Barat:

Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran

Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-2005

Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Salon Kecantikan

Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Perusahaan Air Minum

Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas PPNS

Perda No. 1 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2003

Surat Edaran Bupati No. 451/SE/SOS/2001 tentang Penentuan Pakaian Seragam Siswa-siswi

Surat Edaran Bupati No. 556.3/03/SOS/2001 tentang Himbauan Kepada Pengelola/Pengusaha/Pengunjung/Pengguna Kolam Renang

3. Kabupaten Gianyar - Bali:

Perda No. 7 Tahun 2001 tentang APBD tahun 2001

Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD tahun 2001

Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran

Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001-2005

Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel

Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa

Raperda Kabupaten Gianyar Tahun 2002, Rencana Strategis Gianyar tahun 2002-2005

Perda No. 17 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Keuangan Desa

Surat Keputusan No. 1 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3 buah Raperda Kabupaten Gianyar tahun 2002

Surat Keputusan No. 2 Tahun 2002 tentang Usul/Saran DPRD terhadap 3 Raperda Kabupaten Gianyar tahun 2002

Surat Keputusan No. 13 tahun 2002 tentang Usal/Saran DPRD terhadap Penetapan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2001 dan Pertanggung-jawaban Bupati Gianyar tahun 2001

Surat Keputusan No. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan DPRD Kabupaten Gianyar 23/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar.

Surat Keputusan No. 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib, Pencalonan, Pemilihan dan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar periode tahun 2003-2005

Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Gianyar.

4. Nanggroe Aceh Darussalam:

Qanun No. 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001 – 2005.

APBD Report Fiscal Year 2002 of Nanggroe Aceh Darussalam

Rincian APBD tahun 2003 Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 mengenai Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian *Geuchik*

SK Walikota Banda Aceh No. 67 Tahun 2002 mengenai Susunan Personalia Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh periode 2002-2007

Qanun No. 11 Tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Syariah Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001-2005

5. Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat:

Perda No. 1 Tahun 2001 mengenai APBD Kota Mataram tahun 2001

Perda No. 16 Tahun 2001 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Mataram tahun 2001-2005

Perda No. 17 Tahun 2001 mengenai Program Pembangunan Daerah (Properda) tahun 2002–2006

Perda No. 27 Tahun 2001 mengenai Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

Perda No. 1 Tahun 2002 mengenai APBD Kota Mataram tahun 2002

Perda No. 2 Tahun 2002 mengenai Sisa Perhitungan Anggaran APBD tahun 2001

Perda No. 7 dan 8 Tahun 2002 mengenai Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perda No. 7 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ijin Keselamatan dan Kesehatan kerja

Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ijin Ketenagakerjaan

Perda No. 1 Tahun 2003 mengenai Rencana Strategis Pembangunan Kota Mataram tahun 2003-2007

6. Kota Kendari – Sulawesi Tenggara:

Perda No. 15 Tahun 2001 mengenai Perubahan Kedua atas Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 929 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara

Perda No. 3 Tahun 2002 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kendari

Laporan Pertanggung-jawaban Bupati Kendari tahun 2002

Perda No. 1 Tahun 2002 mengenai APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2002

7. Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat:

Perda Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi, Tata kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Kampong

Perda Kabupaten Kutai Barat No. 14 Tahun 2001 mengenai Cara Calon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi

Perda Kabupaten Kutai Barat No. 15 Tahun 2001 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung

Perda Kabupaten Kutai No. 19 Tahun 2001 mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung

Perda Kabupaten Kutai No. 21 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 305 Tahun 2000 mengenai Pembentukan Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Kutai Barat tahun 2000-2001

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 6 Tahun 2001 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 8 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 10 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Area Hutan Produksi Alam Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 18 Tahun 2001 mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat/Hutan Milik pada Area Hutan Produksi Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 340/K.303/2001 mengenai Tim Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 400/K.321/2001 mengenai Pembentukan Tim Resolusi Konflik dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 8 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Limbah Pada Hutan Rakyat/Hutan Milik, Aral, Tambang, HTI, Perkebunan dan lain-lain

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 522.1 /K.309/2001 mengenai Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2001 mengenai Retribusi Izin Pendirian dan Daftar Ulang Lembaga Pendidikan Luar Sekolah serta Pelayanan Peningkatan Pendidikan

Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2002 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Surat Keputusan DPRD Kota Samarinda No. 21 Tahun 2002 tentang Kedudukan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD kota Samarinda dalam Komisi/Panitia Anggaran/Panitia Musyawarah dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Samarinda Periode 2002-2004

Anggaran Belanja Rutin Kota Samarinda tahun 2002

8. Kota Solok – Sumatera Barat:

Perda No. 1 Tahun 2001 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Perda No. 4 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perda No. 5 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Perda No. 6 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kantor Daerah

Perda No. 11 Tahun 2001 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat

Perda No. 4 Tahun 2000 mengenai Poldas Pembangunan Daerah Kota Solok tahun 2000-2004

Perda No. 5 Tahun 2000 mengenai Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok

Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005

9. Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur:

Perda No. 48 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah pasal 5 tentang Fungsi BKPM Kota Kupang

Perda No. 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang.